

PENGARUH PENGALOKASIAN DANA SEKOLAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Angre Claudia Nasution¹, Asep Supena², Salmatus Saadah Putri³, Septiana Dwiningrum⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta
email: rereclaudia28@gmail.com

Diterima: 11 April 2021, Direvisi: 7 Juli 2021, Diterbitkan: 31 Juli 2021

Abstract: Maximum inclusive education can be seen from good management for the school. One of them is financial management/funding. Funding and the allocation of these funds are one of the influential aspects for the success of schools in implementing inclusive education. So that this study aims to determine the effect of the allocation of school funds at SMA Garuda Cendekia Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method with interview techniques with one of the special supervisor teachers (GPK) who has been teaching for at least 5 years. The results showed that Garuda Cendekia High School needed sufficient funds to implement inclusive education because the management and funding at Garuda Cendekia High School had not been maximized, especially related to special facilities for children with special needs.

Keywords: Fund Allocation, Inclusive, Implementation.

Abstrak: Pendidikan inklusif yang maksimal dapat dilihat dari manajemen yang baik untuk sekolah tersebut. Salah satunya adalah manajemen keuangan/pendanaan. Pendanaan dan pengalokasian dana ini menjadi salah satu aspek berpengaruh untuk keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalokasian dana sekolah di SMA Garuda Cendekia Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dengan salah satu guru pembimbing khusus (GPK) yang sekurangnya telah mengajar selama 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Garuda Cendekia membutuhkan dana yang cukup untuk menerapkan pendidikan inklusif dikarenakan pengelolaan dan pendanaan di SMA Garuda Cendekia belum maksimal apalagi terkait dengan fasilitas khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : Alokasi Dana, Inklusif, Implementasi.

PENDAHULUAN

Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus yang diadakan oleh (UNESCO, 1994) menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan perkembangan pelayanan pendidikan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dimana prinsip mendasar dari pendidikan inklusif, selama memungkinkan, semua anak atau peserta didik seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Hal ini juga diperkuat oleh direktorat pembinaan sekolah luar biasa (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama

di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Pendidikan inklusif ini juga diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan lancar. Salah satu komponen yang sangat penting adalah pendanaan.

Pada dasarnya tidak ada sekolah yang tidak memerlukan biaya atau pendanaan pendidikan termasuk juga sekolah inklusif. Dalam menyelenggarakan sekolah inklusif tentunya memerlukan dana pembiayaan, baik dalam pembiayaan pengadaan sarana dan

prasarana, operasional, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah. Dalam hal ini biaya dikumpulkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan seperti sumber dari pemerintah, sumber biaya dari swasta—yaitu uang sekolah dan pemasukan dari orangtua (Irma Budyastuti: 2010, 5). Hal ini juga diperkuat oleh Garnida (2015) bahwa pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, *Non Governemnt Organization* (NGO), masyarakat (orang tua peserta didik dan lembaga swadaya masyarakat), dan/atau dana dari luar negeri (Garnida, 2015).

Pendanaan sekolah inklusif ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah I dan II (provinsi dan kabupaten/kota). Kondisi ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Pengalokasian dana juga merupakan bagian dari pendanaan. Pengalokasian dana ini merupakan rencana yang penting guna menetapkan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Depdiknas: 2009). Bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh pemerintah (APBN) dan pemerintah daerah (APBD) sebesar 20% termasuk gaji tenaga pendidik. Menurut Badrut Tamam (2018) dalam “Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah” bahwa pengalokasian anggaran pendidikan yang diberikan oleh negara masih tergolong kecil sehingga masalah pendanaan dan pengalokasian pendidikan di Indonesia masih menjadi sebuah masalah. Badrut Tamam (2018) juga berpendapat bahwa pendanaan adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri.

Selain itu, pengalokasian dana yang tidak dialokasikan dengan baik dan benar tentunya akan berpengaruh kepada penyelenggaraan pendidikan termasuk juga pendidikan inklusif. Hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan media, fasilitas, sarana dan

prasarana yang berbeda dengan anak pada umumnya, terlebih dalam hal pendidikan. Sehingga pengalokasian dana sekolah harus dipikirkan secara matang dan merujuk kepada kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Dengan itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalokasian Dana Sekolah Terhadap Pengimplementasian Pendidikan Inklusif” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalokasian dana terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti menurut Herdiansyah (2010). Sehingga peneliti menggunakan metode ini untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi secara mendalam yaitu mengenai pengaruh pengalokasian dana di sekolah inklusi.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Garuda Cendekia Jakarta Selatan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama tiga minggu yang dimulai pada hari Selasa, 25 Mei 2021. Alasan pemilihan lokasi penelitian ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) Garuda Cendekia Jakarta Selatan termasuk sekolah inklusi.

Subyek penelitian ini adalah salah satu guru pembimbing khusus (GPK) yang sekurangnya sudah 5 tahun mengajar di sekolah inklusif dan juga seorang koordinator guru pembimbing khusus (GPK) di SMA Garuda Cendekia. Jumlah Subjek penelitian sebanyak 2 orang. Subjek penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yang dipilih berdasarkan terhadap suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, yaitu sesuai dengan kriteria telah ditetapkan peneliti.

Alat dan Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap subyek yang dilakukan secara daring. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sehingga, instrumen yang dibutuhkan yaitu laptop atau handphone sebagai media dan

dokumentasi wawancara. Selain itu ada alat tulis untuk mencatat informasi hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti sebagai pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam melaksanakan teknik wawancara, pewawancara harus menciptakan hubungan yang baik. Sehingga informan bersedia dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur yaitu dengan membuat terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya. Dalam, melakukan trigulasi, penulis membandingkan hasil wawancara dari 2 subjek yang berbeda

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum melaksanakan wawancara, selama melaksanakan wawancara dan setelah melaksanakan wawancara. Dalam, analisis data kualitatif ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara maka data dianalisis menggunakan analisis tekstual dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya: a. Tarmansyah (2009:75) mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. b. Tarmansyah (2009:76)

mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular. c. L.K.M. Marete (2007:145) mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (*slow learner*) maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem *education for all* tanpa diskriminasi bagi siapapun untuk semua manusia dapat memperoleh pendidikan dan bersekolah dengan teman pada umumnya.

Hasil penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara pada salah satu guru GPK dan koordinator GPK di SMA Garuda Cendekia sebagai salah satu sekolah inklusi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa sumber pendanaan sekolah yang di dapatkan SMA Garuda Cendekia bersumber dari yayasan dan orang tua dan dana BOS pemerintah. Orang tua akan mengeluarkan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap bulan selama proses pembelajaran. Kemudian, pengelolaan keuangan ini dikelola oleh pihak yayasan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan pihak yayasan ini bersifat transparan. Bentuk transparan yang dimaksud ialah kepala sekolah, pihak guru, pihak yayasan dan orang tua mengetahui tujuan penggunaan dana yang telah dikeluarkan. Guru akan membuat perencanaan anggaran sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun sesudah kegiatan pembelajaran. Rancangan perencanaan yang dibuat oleh guru akan yang akan dibahas secara transparansi.

Selain itu pengalokasian dana di SMA Garuda Cendekia juga dialokasikan oleh pihak yayasan. Pengalokasian dana ini pada dasarnya berupa dana insentif bagi guru, dana untuk media pembelajaran serta dana untuk sarana dan prasarana sekolah. Salah satu contoh pengalokasi dana untuk kegiatan pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus ialah melakukan kelas tambahan. Kelas tambahan bertujuan untuk menggali minat serta potensi peserta didik. Salah satu contoh kelas tambahan ialah kelas membuat kaos.

Dalam hal aspek sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas yang berada di sekolah SMA Garuda Cendekia ini tidak melibatkan fasilitas khusus untuk anak berkebutuhan khusus sehingga fasilitas untuk anak berkebutuhan

khusus sama dengan anak lainnya. Sehingga sekolah SMA Garuda Cendekiadirasa belum ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan pendanaan yang kurang memadai. Selain itu, belum ada peserta didik yang membutuhkan fasilitas yang spesifik sesuai kebutuhannya. Sehingga jika ada peserta didik yang ingin masuk SMA Garuda Cendekia dan membutuhkan fasilitas yang spesifik maka SMA Garuda Cendekia belum bisa memenuhi itu semua.

Sekolah yang menyatakan bahwa sekolah tersebut inklusi harus siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Pada sekolah inklusi terdapat peserta didik umum maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Sebelum menyatakan sekolah inklusi, berbagai pihak sekolah harus mengetahui karakteristik, hambatan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sehingga dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, pihak sekolah harus tau bagaimana pelayanan yang tepat untuk pembelajaran yang tepat.

Pendidikan inklusi meliputi tiga macam pelayanan yaitu 1) pengajaran yang dirancang secara khusus, 2) layanan terkait, 3) bantuan dan jasa pelengkap. Komponen-komponen pendidikan yang tercakup dalam sekolah inklusi perlu dikelola. Komponen-komponen pendidikan tersebut mencakupi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan manajemen layanan khusus (Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008: 6-9).

Dalam jurnal "Implementasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah", dituliskan ada tiga persoalan pokok dalam manajemen keuangan. Tiga persoalan pokok pendidikan, yaitu: (a) *financing*, yang menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (b) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (c) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2010:122). Pendidikan tak terlepas dari kendala yang dihadapi terutama dalam bidang pembiayaan atau keuangan. Persoalan tersebut berupa sumber dana yang diperoleh sekolah untuk menunjang proses pendidikan, terpakainya dana sesuai dengan realita dan kebutuhan lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal

itu menjadi fokus penting agar keuangan sekolah dapat terkelola dengan baik.

Dalam jurnal "Implementasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah", ada pendapat lain yang dituliskan Mulyasa. Mulyasa (2011:48) mengemukakan bahwa: "Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, dan bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme." Menurut Ubben, Hughes & Norris (dalam Nurhizrah Gistituati, 2012: 150) kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Manajemen keuangan dalam sekolah inklusif harus terstruktur melalui beberapa tahapan agar kondisi keuangan dapat merata dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Manajemen keuangan dimulai dengan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan dan laporan.

Dalam jurnal taman cendekia dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Bina Harapan Semarang" (2019). Manajemen keuangan/ dana di SD Bina Harapan Semarang masih menggunakan standar reguler. Artinya bahwa belum ada alokasi dana khusus untuk memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa ABK. Beberapa kali SD Bina Harapan Semarang mendapatkan BOP dan beasiswa pendidikan inklusi, dan dari pembayaran SPP dialokasikan untuk pemenuhan sarpras." Dapat terlihat bahwa manajemen keuangan pada sekolah inklusi perlu adanya pemerataan dalam segala aspek.

Selama proses pembelajaran, ada pendanaan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan sekolah apalagi pendidikan inklusi.

Dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif ada beberapa faktor penting penunjang agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik yaitu: 1) Aturan/prosedur penerimaan siswa baru disabilitas sekolah inklusif. 2) Pengembangan

dan pemberlakuan kurikulum sekolah inklusif 3) Rencana pembelajaran di sekolah inklusif. 4) Kegiatan belajar mengajar sekolah inklusif. 5) Bahan ajar dan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 6) Penilaian hasil belajar untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 7) Sarana, prasarana dan lingkungan fisik di sekolah inklusif. 8) Guru dan tenaga kependidikan: guru regular, tenaga admin, kepala sekolah, guru bantu. 9) Guru pendidikan khusus (GPK). 10). Pendanaan untuk sekolah inklusif. 11) Manajemen sekolah di sekolah inklusif. 12) Sikap dan perilaku masyarakat sekolah: siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa. 13) Kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait: pengawas, pejabat dinas Pendidikan, komite sekolah, dunia usaha/industri.

Beberapa faktor penting diatas mempunyai peranan yang penting dalam memperlancar jalannya implementasi di sekolah inklusif. Begitu pula dengan peran penting faktor pendanaan di sekolah inklusif SMA Garuda Cendekia. Dengan adanya pengelolaan pendanaan yang baik dan bijak maka dapat memperlancar jalannya implementasi di suatu sekolah. Dana yang memadai suatu sekolah tentu dapat berdampak baik bagi sekolah itu sendiri seperti dapat membeli alat dan media pembelajaran, menyediakan sarana dan prasana sekolah dan juga insentif guru-guru di sekolah.

Dalam undang-undang sistem pendidikan, No 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam sekolah inklusif di SMA Garuda Cendekia sendiri tanggung jawab pendanaan di serahkan kepada yayasan yang mana akan ada pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendanaan di SMA Garuda Cendekia.

Sumber pendanaan untuk sekolah inklusif terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, *Non Governemnt Organization* (NGO), masyarakat (orang tua peserta didik dan lembaga swadaya masyarakat), dan/atau dana dari luar negeri (Garnida, 2015). Sedangkan sumber dana dari SMA Garuda Cendekia bersumber dari orang tua dan pemerintah. Untuk mengelola dan mengatur pemasukan keuangan dari sumber orang tua dan pemerintah maka pengurus pendanaan SMA Garuda Cendekia meminta setiap guru pembimbing khusus agar membuat rancangan anggaran setiap tahunnya.

Dalam pembayaran sekolah di SMA Garuda Cendekia terdapat perbedaan antara peserta didik pada umumnya dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Pembayaran untuk peserta didik umum sebesar satu juta tiga ratus ribu rupiah. Kemudian, pembayaran untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah. Hal ini dikarenakan bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan fasilitas, alat dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan peserta didik. Dalam hal pengalokasian dana dalam aspek sarana dan prasarana sekolah SMA Garuda Cendekia masih sangat kekurangan dana karena untuk membangun fasilitas yang spesifik dan sesuai dengan ke khususan peserta didik memerlukan dana yang banyak. Sehingga jika ada peserta didik yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan khusus maka SMA Garuda Cendekia belum bisa memenuhinya.

Seperti yang dijelaskan diatas tadi, begitulah kondisi pendanaan di SMA Garuda Cendekia. Pengelolaan dan pengalokasian yang buruk akan berdampak ke beberapa hal. Beberapa hal tersebut berupa penyediaan alat, media pembelajaran, sarana dan prasana dan juga fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMA Garuda Cendekia.

Pengelolaan dan pendanaan yang kurang bijak dapat berpengaruh kepada pembelajaran di sekolah inklusif. Pengaruh tersebut yakni mengakibatkan pembelajaran di sekolah inklusif tidak optimal. Hal ini dikarenakan untuk mengajarkan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus membutuhkan fasilitas, alat dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan ke khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan ke khususan, maka peserta didik berkebutuhan khusus akan mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut ialah hambatan dalam mobilisasi, kesulitan dalam menerima pembelajaran dan hasil belajar yang kurang baik.

Beberapa alasan yang bisa menghambat mobilitas anak berkebutuhan khusus salah satunya bagi anak dengan hambatan penglihatan atau yang sering disebut dengan anak tunanetra. Dengan tidak adanya fasilitas berupa *guiding block* guna mengarahkan jalan tertentu ke kelas, tidak adanya pengenalan kelas yang menggunakan huruf braille dan tidak diatur juga pencahayaan sesuai dengan anak tunanetra maka hal ini dapat menyebabkan terhambatnya mobilitas anak tunanetra.

Dalam segi alat dan media pembelajaran, jika tidak ada media yang disesuaikan dengan karakteristik anak tunanetra seperti guru hanya menampilkan video saja tanpa menjelaskan maksud video tersebut. Maka peserta didik tunanetra tersebut mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini juga berlaku jika tidak tersedianya kertas ulangan yang berhuruf braille maka peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan ulangannya. Karena beberapa pengaruh diatas, hal itu tentu bearkibat pada hasil belajar anak berkebutuhan khusus sehingga baiknya pembelajaran di sekolah inklusif harus memperhatikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan ke khususannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa dalam pengalokasian dana sekolah di SMA Garuda Cendikia belum maksimal. Alasannya ialah SMA Garuda Cendikia masih kekurangan dana dalam hal membangun fasilitas yang spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya dapat berpengaruh kepada penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengakibatkan pembelajaran di sekolah inklusif tidak optimal. Selain itu, berpengaruh juga kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena dapat menghambat mobilitasnya di sekolah, mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran dan berakibat pada hasil belajar anak yang kurang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Eka Sari Setianingsih, Ikha Listyarini. (2019). "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Sd Bina Harapan Semarang." *Jurnal Taman Cendekia* Vol. 03 Nomor 01 H. 265-266.
- Erawati, I. L., Sudjarwo, S., & Sinaga, R. M. (2016). "Pendidikan Karakter Bangsa pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif." *Jurnal Studi Sosia*. Vol 4(1), Nomor 41055.
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). "Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan." *Arfannur*, Vol 1(1), Nomor 41-54.
- Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi. "Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia." *Prosiding Ks: Riset & PKM*. Vol.2 No. 2 Hal: 147 – 300.
- Nabila S, Aning Kesuma Putri. (2019). "Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Di Pulau Bangka Tahun 2017-2018." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol 2, Nomor 2.
- Nuzula, Muhammad Firdaus (2020). "Analisis Manajemen Rencana Keuangan Dan Anggaran Sekolah Inklusi Di SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin."
- Permas, Ida Bagus Made Sutra Isvara, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Made Aristia Prayudi (2018). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkala Yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi)." *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol 8.2.
- Saidah, N. (2020). "Pengertian, Proses Administrasi Keuangan Dan Pemeriksaan Serta Pelaporan."
- Sugandi, M. (2012). "Pola Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Program Studi Keahlian Teknik Bangunan." *Teknologi dan Kejuruan: Jurnal teknologi, Kejuruan dan Penqajarannya*. Vol 34(2).
- Sumarni, M. S. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Aqama dan Keagamaan*, Vol 17(2), Nomor 294355
- Suwandi, S. (2012). "Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol 21(2).
- Tamam, B. (2018). "Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah." *Misykat Al-Anwar*, Vol 29 (2), 257189.
- Vitasari, N., & Tuter Martaningsih, S. (2019). "Kesiapan Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Kulon Progo." *Disertasi*. Universitas Ahmad Dahlan: Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Zahrudin, Zahrudin, Zainul Arifin, and Achmad Suhandi. 2019. "Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah." *Jurnal*

*Administrasi Pendidikan. Vol 26 (1),
Nomor 46-56.*